

## Surat Kabar *Merdeka* dalam Arus Krisis Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965)

Syifa Rizky Maulani<sup>1</sup>, Sri Martini, S. S, M. Hum.<sup>2</sup>, Dr. Kurniwati, M.Si.<sup>3</sup>

Universitas Negeri Jakarta<sup>123</sup>

Email: [Syifarizkymaulani\\_1403621028@mhs.unj.ac.id](mailto:Syifarizkymaulani_1403621028@mhs.unj.ac.id), [kurniawati@unj.ac.id](mailto:kurniawati@unj.ac.id),  
[srimartini7271@gmail.com](mailto:srimartini7271@gmail.com)

**Abstract:** *The research entitled Merdeka Newspaper in the Current of Press Freedom Crisis During the Guided Democracy Era (1960-1965) aims to examine and describe how Merdeka newspaper adapted or faced the current of press freedom crisis during the Guided Democracy period (1960-1965) with its strategy, as well as its impact on the role of the media as a pillar of democracy. Using historical research methods and analytical descriptive approaches with authoritarian press theory and Gramsci's hegemony theory. This study shows that the Guided Democracy era was marked by restrictions on press freedom through various government policies that made the mass media a tool for state ideological propaganda. Merdeka newspaper founded by B.M. Diah experienced similar pressures but still tried to maintain its independence. By using Antonio Gramsci's Authoritarian Press and Hegemony theories, this study shows that despite facing state pressure, Merdeka still tried to carry out its journalistic function through editorial compromise.*

**Keywords :** *Merdeka Newspapers, Guided Democracy, Freedom of the Press, Authoritarian Press, Hegemony.*

**Abstract :** Penelitian berjudul Surat Kabar *Merdeka* Dalam Arus Krisis Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965) ini bertujuan untuk mengkaji serta menguraikan bagaimana surat kabar *Merdeka* beradaptasi atau menghadapi arus krisis kebebasan pers selama periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965) dengan strateginya, serta dampaknya terhadap peran media sebagai pilar demokrasi. Menggunakan metode penelitian historis dan pendekatan deskriptif analitis dengan teori pers otoriter dan teori hegemoni Gramsci. Penelitian ini menunjukkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan pembatasan kebebasan pers melalui berbagai kebijakan pemerintah yang menjadikan media massa sebagai alat propaganda ideologi negara. Surat kabar *Merdeka* yang didirikan oleh B.M. Diah ini mengalami tekanan serupa namun tetap berusaha mempertahankan independensinya. Dengan menggunakan teori Pers Otoriter serta Hegemoni Antonio Gramsci,

penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan negara, *Merdeka* tetap berusaha menjalankan fungsi jurnalistiknya melalui kompromi-redaksional, dimana *Merdeka* berusaha menyesuaikan diri dengan iklim politik yang represif tanpa sepenuhnya kehilangan karakter kritisnya. Kritik tetap dilayangkan oleh *Merdeka* dengan bahasa dan nada yang konstruktif dan berpedoman pada Manipol.

**Kata kunci** : Surat Kabar *Merdeka*, Demokrasi Terpimpin, Kebebasan Pers, Pers Otoriter, Hegemoni.

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, pers telah menjadi elemen kritis dalam membentuk dan memandu opini publik. Khususnya, pada masa-masa tertentu yang ditandai oleh ideologi liberal dan terpimpin, dinamika peran media pers mengalami perubahan yang signifikan. Dari sudut pandang politik, pers dapat dikatakan merupakan pilar keempat penyelenggaraan organisasi negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Manan, 2010). Kebebasan pers merupakan prasarat utama bagi demokrasi, trias politika dalam teori John Locke yang diberlakukan di Indonesia juga membutuhkan kebebasan pers supaya demokrasi dapat berkembang (Syafriadi, 2023). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pers adalah salah satu pilar demokrasi dan kemerdekaan pers adalah suatu keharusan.

Kebebasan pers adalah prinsip yang menegaskan bahwa media massa termasuk surat kabar memiliki hak untuk mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi atau opininya tanpa ada campur tangan, sensor, atau bahkan intimidasi dari pihak manapun, termasuk pihak pemerintah. Dalam Sejarah perkembangan pers di Indonesia, salah satu masalah yang menonjol adalah pelarangan terbit atau “pembreidelan” terhadap surat kabar (Dept. Penerangan RI, 1983). Corak pemerintahan serta arah kebijakan yang berbeda pada periode Demokrasi Terpimpin dibandingkan dengan periode Demokrasi Liberal membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers di Indonesia.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri sistem Pers Bebas yang dianut sejak awal revolusi (Pratama, 2018). Pada masa Demokrasi Terpimpin kebebasan pers dibungkam demi kepentingan pemeliharaan ketertiban umum dan perseteruan politik (Shaffat, 2008). Kedudukan serta fungsi pers di masa ini diarahkan penguasa

untuk mencapai tujuan politik dan suara-suara pers yang bernada melawan harus dibungkam. Kebebasan pers yang sebelumnya berkembang selama masa Demokrasi Liberal kemudian berangsur-angsur terekdusi, karena pemerintah memanfaatkan surat kabar dan media massa sebagai alat propaganda resmi untuk membentuk opini publik yang sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Di tengah suasana politik yang bergejolak pada tahun-tahun tersebut, peran media massa menjadi amat penting dalam membentuk opini publik dan menyuarakan berbagai aspirasi dari rakyat meskipun media massa mendapatkan tekanan dari pemerintah, terutama pada saat masa SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) ketika Indonesia dinyatakan dalam kondisi darurat perang. Pada masa itu pemerintah memberikan wewenang kepada militer untuk mengawasi kehidupan politik dan mengontrol pers demi terciptanya ketertiban dan keamanan (Pratama, 2018). Salah satu media massa yang menonjol dalam dinamika tersebut adalah surat kabar *Merdeka* milik seorang tokoh jurnalis senior B.M Diah.

Surat Kabar *Merdeka* adalah salah satu surat kabar yang mengiringi perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Lahir sejak masa revolusi fisik Indonesia tahun 1945 menjadi pers *republikan* pada masa itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa surat kabar ini berani mempertaruhkan segalanya untuk membela proklamasi. Besarnya nama B.M Diah juga membuat surat kabar ini menjadi surat kabar besar di masa itu, dan ini pula yang menjadi alasan penulis memilihnya sebagai topik utama penelitian ini.

Hal menarik yang mendasari penulis memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai kebebasan pers di masa Demokrasi Terpimpin adalah karena masa ini mencerminkan paradigma politik yang sangat berbeda dengan masa sebelumnya yaitu Demokrasi Liberal, seperti yang sudah disinggung di atas. Di zaman Demokrasi Liberal mass media Indonesia mempunyai kebebasan mutlak (Kakailatu, 1997). Kebebasan pers dianggap sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi dan memberikan ruang yang beragam suara masyarakat. Berbeda dengan yang terjadi pada masa Terpimpin, dimana pers sering diarahkan untuk menjadi alat propaganda ideologi, diarahkan untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan pandangan pemerintah.

Berdasarkan temuan penulis pada tulisan-tulisan ilmiah terdahulu, penulis mendapati bahwa penelitian mengenai surat kabar *Merdeka* sebelumnya sudah pernah dilakukan namun dengan konteks yang sedikit berbeda dan dengan periodisasi yang juga berbeda. Sejauh ini belum diketemukan literatur ilmiah lain dengan bahasan terkait surat kabar *Merdeka* pada masa Demokrasi Terpimpin yang lebih spesifik. Dapat dikatakan bahwa topik terkait surat kabar *Merdeka* yang berfokus pada periode Demokrasi Terpimpin yang lebih mendalam masih jarang ditemukan. Karena hal ini serta berbagai pertimbangan penulis, maka penulis merasa perlu adanya tulisan yang membahas lebih dalam mengenai surat kabar *Merdeka* pada masa Demokrasi Terpimpin.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sejarah atau historis yang ingin mengamati dinamika kebebasan pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang diambil dari sudut pandangan surat kabar *Merdeka* dalam kurun tahun 1960-1965. Dalam penelitian historis ini penulis menggunakan lima tahapan berdasarkan buku Pengantar Ilmu Sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo, yakni: (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik pengumpulan sumber, (3) Verifikasi atau kritik sumber, (4) Interpretasi: analisis dan sintesis, (5) Penulisan.

Sedangkan, penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dengan pendekatan ini penulisan ini bersifat analitis dan perlu menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial beserta teorinya. Implikasinya dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan teori relevan, seperti Teori Pers Otoriter dan Teori Hegemoni Antonio Gramsci yang sudah diuraikan sebelumnya pada bagian kerangka analisis.

Tahapan pertama yaitu pemilihan topik. Dipilihnya surat kabar *Merdeka* sebagai topik utama adalah didasarkan pada besarnya nama surat kabar bentukan B.M. Diah tersebut dalam kancah persuratkabaran di Indonesia khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebagai surat kabar yang telah lahir sejak masa Revolusi Fisik dan tumbuh bersama dengan Indonesia, *Merdeka* menjadi surat kabar yang mempunyai peranan yang amat signifikan dan dapat dikatakan sebagai

surat kabar yang menemani perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. *Merdeka* pun tampil sebagai surat kabar yang menonjol dalam kancah perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin sendiri dipilih sebagai periodisasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya adalah karena periode ini menggambarkan realitas yang cukup jauh berbeda dengan yang ada pada masa Demokrasi Liberal dalam sistem politik yang berimbang pada kebebasan pers. Di masa ini kebebasan pers yang semula ada pada masa Liberal tidak lagi didapatkan oleh media massa. Perbedaan tersebut dapat pula dilihat dari peralihan fungsi pers yang semula sebagai media penyampai suara masyarakat yang bebas dan beragam, menjadi sebuah alat revokusi atau alat propaganda pemerintah, hingga pers sendiri mengalami apa yang disebut sebagai ‘Manipolisasi’.

Secara temporal, penelitian ini terbatas pada rentang waktu yakni 1960 hingga 1965 atau pada periode Demokrasi Terpimpin. Alasan dipilihnya periodisasi ini sebagai batasan temporal adalah karena tahun 1960 menjadi tahun dimulainya periode manipolisasi pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sementara dipilihnya tahun 1965 sebagai batas akhir periodisasi penelitian adalah karena pada tahun ini surat kabar *Merdeka* mengalami pembreidelan karena tergabung dalam Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yaitu sebuah perkumpulan pers anti PKI.

Tahap selanjutnya adalah heuristik atau mengumpulkan sumber. Pada penelitian ini, akan digunakan sumber-sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut penulis kumpulkan melalui penelusuran di berbagai tempat perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Perpustakaan Nasional RI Salemba, perpustakaan UPT UNJ, perpustakaan Jakarta Cikini, perpustakaan SMAN 107 Jakarta, Ruang Baca Sejarah Gedung FISH, dan laman laman online lainnya yang tersedia di internet seperti Google Scholar.

Sumber primer yang akan penulis gunakan adalah berupa arsip-arsip koran sezaman yang diterbitkan oleh surat kabar *Merdeka* selama rentang tahun 1960-1965, berupa pula buku yang membahas khusus mengenai *Merdeka* yang ditulis oleh Chaniago berjudul *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985*, terbit

pada tahun 1987 yang menuliskan tentang surat kabar *Merdeka* lebih mendalam. Sementara, sumber sekunder yang akan digunakan adalah sumber tertulis berupa buku-buku kesejarahan, jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi dan tesis yang membahas mengenai perkembangan pers atau jurnalistik di Indonesia secara khusus maupun yang membahas mengenai pemerintahan Demokrasi Terpimpin secara umum.

Langkah ketiga setelah mengumpulkan berbagai sumber adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap ini sumber-sumber yang telah diperoleh selanjutnya melalui tahapan kritik sumber guna mengevaluasi keandalannya sebagai sumber penelitian dan keterkaitannya dengan penulisan penelitian ini baik dari segi material maupun isinya.

Tahap keempat yaitu interpretasi, tahap penafsiran. Setelah bermacam-macam bukti ditemukan dan dicatat, semuanya itu harus dipertimbangkan lagi, karena bukti tidak dapat menjelaskan apapun tanpa tafsiran manusia (Frederick, 1982). Langkah ini merupakan upaya untuk menjelaskan fakta-fakta yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis untuk merekonstruksi ulang sejarah yang akan ditulis pada tahapan terakhir. Tahap kelima, tahapan terakhir ini adalah penulisan kembali. Fakta-fakta sejarah yang tadi sudah didapatkan melalui interpretasi, kemudian diseleksi dan disusun serta diurutkan secara kronologis dan sistematis. Setelah itu penyajiannya dalam tulisan ini dijabarkan menjadi Pendahuluan, Pembahasan dan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kehidupan dan Kebijakan Pers Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965)**

Hegemoni soekarno sebagai presiden dan Pemimpin Besar Revolusi terpampang nyata dalam periode Demokrasi Terpimpin ini. Soekarno berhasil menancapkan hegemoninya dalam masyarakat dengan sistem "terpimpin" yang dikemukakannya. Hegemoni Soekarno didapatkannya dengan menggiring pemahaman dan kesepakatan kolektif masyarakat mengenai nilai-nilai, norma, dan ideologi yang dilegitimasi melalui mekanisme konsensus yang diupayakan melalui institusi-institusi sosial dalam masyarakat, termasuk melalui pers. Kenyataan

terkait hegemoni pemerintah dalam Demokrasi Terpimpin itu tercermin juga dalam dunia pers. Pada masa ini pers mengalami pengungkungan yang ketat melalui regulasi dan pengawasan pemerintah yang represif. Pemerintah secara aktif mengontrol isi pemberitaan dan arah redaksi media massa.

Kebijaksanaan pemerintah terhadap pers di masa Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan. Sebab beberapa kali pula terjadi perubahan dalam corak pemerintahan (Tim Penelitian Sejarah Pers di Indonesia, 1983). Corak pemerintahan yang berbeda pada periode 1950-1965 juga membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers. Perkembangan di bidang politik pun berperan besar dalam melahirkan peraturan-peraturan yang menekan pers. Berawal dari alam kebebasan dalam zaman Demokrasi Parlementer, pers Indonesia tumbuh dan bebas menyuarakan realitas yang terjadi, menjadi sumber informasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Di zaman Demokrasi Liberal, mass media Indonesia mempunyai kebebasan mutlak (Kakailatu, 1997). Namun, ketika terjadi peralihan masa, kebebasan pers berakhir karena hanya dijadikan alat dan corong resmi bagi kebijakan politik pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pers yang ada di masa Demokrasi Terpimpin didorong juga oleh aksi *retooling* yang akan diadakan dalam semua lembaga pemerintahan dan organisasi di Indonesia. *Retooling* yang menjadi salah satu agenda dalam Manifestasi Politik ini dilakukan juga dalam lembaga pers. Menurut Kolonel Basuki Rachmad, Ketua Pembina dan Pengendalian Pers, dalam ceramahnya (Merdeka, Pers Nasional dalam Rangka Manipol-Usdek, 1961), *retooling* dalam lembaga pers dimaksudkan pada dua tujuan, yaitu 1) agar yang tidak sesuai dengan alam Demokrasi Terpimpin dibuang, dan 2) untuk menghimpun segala kekuatan dalam bidang pers secara lahir dan mental hingga memiliki daya juang yang tinggi guna melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.

Sepanjang periode kepemimpinan Soekarno termasuk Demokrasi Terpimpin, terdapat tiga jenis pers, yaitu pers independen, pers partai politik dan pers afiliasi. Pers yang menjadi corong bagi sebuah kekuatan politik memuat berita dan opini pers yang menjadi perpanjangan dari kebijakan dan program kekuatan politiknya tersebut. Pers yang semacam itu seringkali disebut juga sebagai pers partisan, selain jenis tersebut terdapat juga jenis pers independen atau yang akrab

juga disebut *personal journalism*. Independensi sikap dari Lembaga pers tersebut juga dipengaruhi oleh pimpinan produksinya (Prasetyo, 2016). Pada periode ini dibentuk juga suatu lembaga berita nasional, melalui Keputusan Presiden No. 307 Tahun 1962, dibentuklah Lembaga Kantor Berita Nasional “Antara”.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak membawa kebaikan bagi media massa Indonesia (Kakailatu, 1997). Setelah bulan Juli 1959, kampanye indoktrinasi massal, yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, diperkenalkan untuk mempropagandakan dan menyebarkan ideologi Manipol/USDEK (Hong Lee, 1971). Dalam pelaksanaan indoktrinasi massa, pers sebagai media massa dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menjangkau massa dan mengenalkan tujuan Demokrasi Terpimpin. Agar tugas tersebut terlaksana dengan baik, maka pers harus terlebih dulu diorganisir di bawah bimbingan pusat, pers harus menjadi pers yang terarah.

Pada periode Terpimpin ini secara normatif hubungan antara pers dengan pemerintah merupakan kelanjutan dari masa darurat perang yang berlangsung pada periode sebelumnya, hubungan tersebut bersifat pengawasan dan pembinaan terhadap pers. Otoritasi pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin atas pers yang terlihat dalam berbagai kebijakannya tampaknya berdampak pada jumlah surat kabar dan majalah yang menurun bila dilihat perbandingannya dengan masa Demokrasi Liberal. Selama periode 1959-1965 jumlah surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia terhitung sekitar 187 buah, sebuah jumlah yang terbilang kecil. Pada periode 1960-1965, peredaran penerbitan pers pun tidak menunjukkan perkembangan yang stabil.

Dalam upaya melaksanakan nasionalisasi pers dilakukan penyitaan terhadap percetakan-percetakan swasta. Tindakan pemerintah yang menyita sejumlah percetakan swasta di kota-kota tertentu itu berdampak pada penerbitan surat kabar yang dicetak di tempat tersebut. Di tahun berikutnya, pemerintah dalam hal ini Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) mengeluarkan peraturan bahwa semua percetakan yang kepemilikannya dipegang oleh swasta berada di bawah pengawasan pemerintah. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Badan Pengawasan dan Pembinaan untuk mengelola percetakan-percetakan tersebut,

anggota badan tersebut berasal dari lembaga-lembaga AD, penerangan, kejaksaan, dan kepolisian tiap daerah.

Bentuk lainnya dari kontrol pemerintah atas pers adalah dikeluarkannya peraturan yang berkaitan dengan aturan mengenai reorganisasi partai yang muncul dalam konstelasi politik Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah mengesahkan Peraturan Peperti No. 5/1960 yang mengatur tentang pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun, lukisan-lukisan, klise-klise, dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7/1960 dan Peraturan Presiden No. 13/1960.

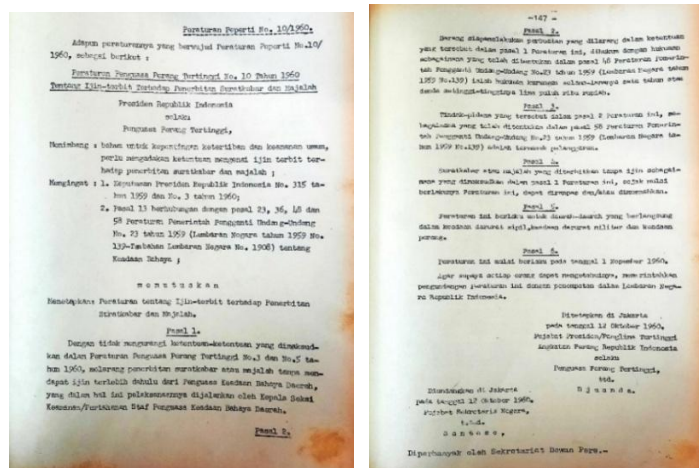
15 Mei 1963 presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6/1963 yang berisi prinsip-prinsip berkaitan dengan bentuk, tujuan, dan pelaksanaan pembinaan pers. Isi lengkap dari Penetapan Presiden tersebut dicantumkan oleh Merdeka pada muka halaman utama edisi 16 Mei. Bila melihat isinya secara mendalam, maka Penetapan Presiden ini boleh dikatakan sebagai pengisi posisi Undang-Undang pers untuk sementara sebelum Undang-Undang pers itu sendiri tersusun rampung, karena di dalamnya sudah mengatur tentang pedoman pokok dan pembinaan pers yang terlengkap dan menurut pemerintah sudah mampu berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang pers.

Demi membentuk suatu pers yang termanipolisasi ini presiden membentuk sebuah badan, yaitu Badan Pembina dan Pengendalian Pers pada bulan Juli di tahun yang sama. Badan itu terdiri dari para Menteri dan para pejabat tinggi dari kalangan sipil dan militer. Dalam sebuah rapat yang diadakan Badan Pembina dan Pengendali Fungsi Pers pada 11 Oktober 1960 dicetuskan tentang sebuah pedoman untuk pers nasional yang menyatakan bahwa pers adalah merupakan penggerak massa dan alat revolusi yang sejajar dengan alat-alat revolusi lainnya dalam Masyarakat.

Pedoman resmi itu dinamai "Pedoman Peperti 12 Oktober 1960" untuk para penerbit surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia. Pedoman ini mewajibkan surat kabar dan majalah menjadi pedoman, pembela dan alat penyebaran Manifesto Politik. Selanjutnya, menurut pedoman ini bagi surat kabar atau majalah yang tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak akan

memperoleh perizinan terbit atau izin pemakaian kertas, serta tidak luput dari tindakan-tindakan tegas yang dilayangkan oleh pihak berwenang.

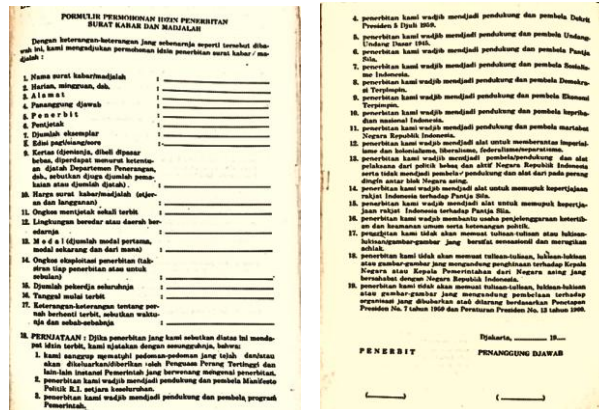
Pasca diumumkannya petunjuk-petunjuk penertiban pada tanggal 12 Oktober 1960, sehari setelahnya pada 13 Oktober 1960, Djuanda selaku Pejabat Presiden mengeluarkan sebuah peraturan mengenai izin penerbitan. Peraturan mengenai izin terbit ini tertuang dalam Peraturan Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) No. 10 tahun 1960 yang terdiri dari 6 pasal beserta penjelasan detailnya.



Gambar 1. Peraturan Peperti No. 10 Tahun 1960

Peraturan ini kemudian dilengkapi dengan Surat Presiden No. 3568/HK/1960 dengan isi yang sama (Hong Lee, 1971) dan tiga tahun setelahnya dipertegas dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963. Perlu diketahui bahwa Peraturan Peperti No. 10/1960 dan PenPres No. 6/1963 merupakan dua peraturan yang menjadi ‘tulang punggung’ (Tim Penelitian Sejarah Pers di Indonesia, 1983) bagi kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pers sesudah tahun 1959 hingga tahun 1965 ketika Penpres No. 6/1963 dicabut secara resmi dan digantikan dengan UU Pokok Pers tahun 1966.

Setelah dirasa sudah memenuhi tujuh persyaratan sebelum mengajukan izin, para penerbit ataupun pimpinan redaksi surat kabar dan majalah harus menandatangani formulir tersebut yang berisi 19 pasal. Kesembilan belas pasal yang harus disanggupi tersebut merupakan cerminan dari kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu yang berkaitan dengan Manipol dan Usdek.



Gambar 2. Formulir 19 Pasal

Meski sudah menandatangani formulir kesanggupan atas 19 pasal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa izin terbit yang sudah didapatkan ditarik kembali oleh pemerintah. Peperda Jakarta Raya dan sekitarnya tidak akan memberikan izin atau mencabut izin terbit atau menaguhkan permohonan izin terbit bagi surat kabar atau majalah yang pada dasarnya mempopulerkan ideologi politik yang bukan ideologi politik Pancasila. Izin terbit juga akan dicabut sewaktu-waktu apabila pihak berwajib menganggap hal tersebut diperlukan.

Agaknya puncak dari upaya pemerintah dalam menertibkan pers di masa Demokrasi Terpimpin adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65. Pada tanggal 26 Maret 1965, Departemen Penerangan mengeluarkan sebuah peraturan mengenai Norma-Norma Pokok Pengusahaan Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia. Berdasarkan Keputusan tersebut, seluruh surat kabar di Indonesia diwajibkan mempunyai afiliasi dengan salah satu kekuatan politik dalam hal ini partai politik atau organisasi massa yang diakui oleh pemerintah. Pers yang ingin terbit harus mendapat pernyataan dukungan yang resmi dari partai politik atau organisasi massa atau Panca Tunggal (lima pejabat tertinggi daerah).

### Merdeka dalam Arus Krisis Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Seperti yang sudah diuraikan bahwa terjadi indoktrinasi Manipol ke dalam pers, pers dituntut untuk menjadi alat revolusi serta corong pemerintah dalam

menyebarkan Manipol, karenanya pers harus termanipolisasi. Salah satu upaya Manipolisasi ini adalah dengan mengharuskan setiap surat kabar menyediakan sebagian besar halaman terbitannya untuk memuat ceramah-ceramah terkait Manipol tanpa menambahkan catatan redaksional apapun. Inilah yang juga terjadi pada *Merdeka* yang sejak Januari 1960 sudah memuat ceramah-ceramah atau liputan mengenai kutipan pidato para pejabat mengenai Manipol meskipun belum mengisi sebagian besar dari empat halaman terbitan harian. Ceramah-ceramah itu semakin gencar diedarkan dimulai pada bulan September 1960. Berbagai ceramah dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Soekarno, Menteri Penerangan Maladi, Menteri Roeslan Abdulgani, dan ceramah-ceramah lainnya dalam berbagai kesempatan yang memuat tentang Manipol akan mewarnai sebagian besar dari total empat halaman.

*Retooling* terhadap pers atau alat-alat publikasi dilaksanakan juga dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mengatur penertiban terhadap pers, seperti surat izin terbit dan surat izin pembagian kertas. Peperti mengeluarkan sejumlah peraturan yang menyangkut pers. Seperti Peraturan Peperti No. 10/1960 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 1960, yang mengatur tentang kewajiban para penerbitan media massa untuk membela dan menjadi corong pemerintah serta menyebarluaskan Manipol. *Merdeka* sendiri pada dasarnya melihat peraturan itu sebagai sesuatu yang berseberangan dengan prinsipnya. Aturan itu tidak sejalan dengan motto “Berpikir Merdeka, Bersuara Merdeka, dan Hak Manusia Merdeka” yang dianutnya. Namun, berbeda dengan *Indonesia Raya*, *Merdeka* justru menerima peraturan tersebut, meskipun sejatinya jiwa Peraturan Peperti No. 10/1960 tersebut bertolak belakang dengan falsafah kebebasan pers yang dianut oleh *Merdeka*. *Merdeka* dengan ‘legowo’ menerimanya atas dasar melancarkan jalannya revolusi, untuk menyelamatkan Pancasila, dan UUD 1945 – karena memang surat kabar berlogo merah ini berdiri pada garis haluannya yaitu Pancasila dan setia pada cita-cita proklamasi dan pemimpinya.

Segera setelahnya, *Merdeka* memperoleh izin terbit terbaru dari Peperda, yang kemudian dicantumkan dalam setiap edisi hariannya sejak edisi 1 November 1960 pada bagian kolom pojok kiri halaman kedua yang juga tertulis nama-nama pengasuh *Merdeka*, penerbit, kantor cabang, dan daftar harga langganan. Nomor

izin terbit terbaru itu dicantumkan di bagian terbawah kolom yang tertulis “Izin Penerbitan : Keputusan Penguasa Perang Daerah Djakarta Raya No. 171 Tahun 1960”.

Pada tahun 1963 *Merdeka* mengalami pergantian pemimpin redaksi, sebab B.M Diah ditunjuk oleh presiden sebagai Duta Besar Cekoslowakia. Di antara beberapa pilihan penggantinya, muncul nama seorang wartawan muda dan cerdas yang dipandang oleh B.M Diah memiliki garis dan sikap politik yang matang. Joesoef Isak, wartawan muda yang kerap disapa dengan “Bang Ucup” saat itu di usia 35 tahun (Triyana & Lane, 2008) memegang jabatan sebagai “redaksi pertama” dalam *Merdeka* pada akhirnya dipilih atas dasar pertimbangan cukup matang dari B.M Diah.

Pada paruh awal periode kepemimpinan Joesoef, *Merdeka* tampil sebagai pembela yang gigih bagi Manipol dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik Presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinan wartawan muda progresif itu *Merdeka* dibawa masuk ke dalam regu pers-progresif bersama dengan *Harian Rakjat*, *Bintang Timur*, *Suluh Indonesia*, dan *Warta Bakti*. Regu pers-progresif ini mendukung penuh kebijakan-kebijakan radikal Soekarno. Tahun 1963, gerak politik Joesoef sebagai pemimpin redaksi saat itu memperlihatkan indikasi melenceng ke kiri, menyimpang dari garis politik surat kabar asuhannya itu yang sudah diputuskan sejak kelahirannya. Joesoef dianggap tidak lagi progresif-revolusioner karena terlihat ikut terbawa arus gelombang politik yang selalu menguntungkan PKI, Joesoef termakan propaganda dan taktik PKI.

B.M Diah menyadari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Joesoef ketika ia mendapat laporan dari Suhardiman, Ketua SOKSI. B.M Diah kemudian mengupayakan agar meluruskan kembali Joesoef pada garis yang semestinya, namun ternyata upayanya tidak berbuah hasil. Melihat kegagalan upaya itu, B.M Diah tidak menyerah. Demi menjaga konsistensi surat kabarnya itu, ia segera mengambil tindakan, hasil akhirnya, diputuskan bahwa jabatan Joesoef akan digeser dari pemimpin redaksi menjadi anggota dewan pimpinan perusahaan. Ini bukanlah sebuah pemecatan atasan pada bawahannya, namun pengangkatan itu ditolak oleh Joesoef.

Polemik pencopotan Joesoef ini kemudian menjadi perbincangan yang ramai di kalangan pers. Pihak luar melihatnya sebagai pemecatan pegawai secara sepihak oleh *Merdeka*. Berbagai rekasi dan tanggapan dilemparkan kepada *Merdeka*. Pada tanggal 24 Agustus 1963 *Merdeka* menuliskan wacana berjudul “Soal Jang Sebenarnja” yang memuat mengenai pengangkatan Joesoef menjadi anggota dewan pimpinan Perusahaan Merdeka Press dan *Indonesia Observer*. *Merdeka* menegaskan tidak ada konflik politik, yang ada hanya perbedaan pada tafsiran mengenai taktik-taktik politik *Merdeka* yang sudah ditradisikan sejak 1945.

*Merdeka* menegaskan bahwa tidak akan menjadi alat suatu golongan. Ditegaskan juga bahwa Joesoef telah membawa kebijaksanaan politik yang sengaja hanya menguntungkan suatu golongan saja dengan mengesampingkan arti golongan-golongan revolusioner lainnya, sehingga bertentangan dengan keinginan Manipol. Inilah yang menurut *Merdeka* merupakan hal yang bertentangan dengan garis politik *Merdeka* yang mendukung tafsiran Manipol Bung Karno. Pada edisi 26 Agustus 1963 *Merdeka* kembali mengulas permasalahan ini dalam Induk Karangan berjudul “Pendirian Kita” yang sengaja dicantumkan dalam halaman utama. Dalam tulisan ini *Merdeka* persoalan Joesoef ini hanya merupakan salah satu dari gejala umum dimana suatu golongan mencoba menonjolkan ideologinya di masyarakat. Gejala ini sudah mulai nampak di kalangan persuratkabaran, dan Joesoef telah menjadi korbannya secara tragis.

Di sisi lain, kasus Joesoef ini ternyata berdampak positif terhadap pemantapan struktur, personalia, dan garis politik *Merdeka*. Pergeseran pemegang posisi pimpinan ini juga telah merubah strategi dan punya pengaruh signifikan bagi naik-turunnya perjuangan *Merdeka*. Setelah kasus ini, dalam internal tubuh *Merdeka* tekad para redaktornya semakin bulat untuk mematuhi prinsip surat kabar tersebut yang sudah dianut sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan diikrarkannya pernyataan oleh Harmoko yang berdiri atas nama Korps Wartawan Merdeka, Majalah Merdeka, dan *Indonesia Observer*. Ikrar itu dibacakan dihadapan B.M Diah dan seluruh anggota korps kemudian ditandatangani oleh 21 wartawan dari 22 wartawan yang bekerja di *Merdeka*. Pernyataan bersama itu kemudian dimuat secara lengkap dalam berita utama edisi 21 Agustus 1963 dengan tajuk “Corps Wartawan Merdeka Kompak dan Bersatu-padu Menolak Politik Petjah Belah Dari Luar”.

*Merdeka* di bawah naungan kepemimpinan Hiswara muncul dalam pentas perpolitikan yang menampilkannya sebagai salah satu pemeran kekuatan politik dalam menyelamatkan jalannya revolusi dengan kekuatan nasionalisme. Namun ternyata konstelasi politik Indonesia sendiri menampilkan hal yang berseberangan dengan visi surat kabar ini. *Merdeka* melihat bahwa aktor utama yang menimbulkan gejala buruk bagi revolusi adalah PKI yang semakin kuat posisinya dalam panggung politik Demokrasi Terpimpin. Sehingga sejak Agustus 1963 hingga seterusnya surat kabar ini menampakkan dirinya sebagai surat kabar yang berposisi dengan partai ‘palu-arit’ itu dan surat-surat kabar penyokongnya. Konfrontasi yang dilakukan terhadap PKI, hingga kemunculan berbagai polemik dengan *Harian Rakjat* surat kabar corong PKI mewarnai terbitan *Merdeka* selama rentang kurang lebih satu tahun melalui tajuk-tajuk berita dan kolom catatan pojok Dr. Clenik.

Demi mencapai cita-cita revolusi, Hiswara Darmaputra selaku pimpinan redaksi melancarkan berbagai strategi. Seperti dengan memancing tanggapan pembaca melalui tulisan berisi Analisa mengenai perbedaan ideologi yang tengah berkembang, atau dengan memunculkan berita-berita konfrontatif melalui polemik-polemik yang tengah berlangsung, dilontarkan juga berita pancingan terhadap lawan. Strategi memancing reaksi lawan dapat dilihat dari tulisan Induk Karangan berjudul “Gagasan Satu Partai” yang di dalamnya *Merdeka* mengemukakan pendapatnya mengenai gagasan penyederhanaan partai politik dan membentuk partai tunggal yang besar dan hanya berasaskan pada Pancasila.

Setelahnya, *Merdeka* terus menerus terlibat dalam pusaran polemik lainnya, berawal dari tulisan-tulisannya yang menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Hingga muncul babak baru perlawanan *Merdeka* atas dominasi PKI yang dilancarkan dengan strategi baru secara diam-diam. *Merdeka* diam-diam mengumpulkan sekutu yang bersedia berdiri di belakangnya dan bersatu untuk menyusun perlawanan terhadap PKI dan Soekarno. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dimatangkan kembali bersama dengan kawan-kawan wartawan lainnya melalui dua kali pertemuan. Hasil final dari empat kali pertemuan tersebut melahirkan sebuah badan yang kemudian disebut sebagai Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS).

*Merdeka* mengumumkan terbentuknya badan ini melalui sebuah kolom pada halaman utama edisi 9 November 1964 dengan tajuk “Badan Pendukung Sukarnoisme Terbentuk Dalam Bidang Pers, Radio dan TV”. Badan ini ditujukan untuk lebih menyebarkan Soekarnoisme hingga ke sekenang pelosok-pelosok tanah air dan sedapat mungkin juga keluar negeri. Pada dasarnya BPS adalah sebuah wadah perjuangan yang dalam strateginya akan selalu melancarkan kritik terhadap Soekarno dan PKI. Sifat organisasi BPS mirip dengan organisasi SPS (Serikat Penerbit Surat kabar), sebab yang tergabung di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin surat kabar atas nama surat kabarnya bukan wartawan-wartawannya secara individu sebagaimana keanggotaan dalam PWI. BPS yang juga disebut *Merdeka* sebagai badan penyiar Soekarnoisme ini meningatkan kepada anggota-anggotanya untuk tetap menjalankan penyebaran Soekarnoisme meski mendapat tuduhan dari *Harian Rakjat*.

Meski namanya adalah Badan Pendukung Soekarnoisme, namun dalam pergerakannya selalu mengkritik Soekarno sendiri, inilah yang kemudian membuat gerakan politik ini dimusuhi oleh Soekarno – atas bisikan dari PKI yang menyebut bahwa BPS telah menyelewengkan ajaran-ajaran Soekarno. Sehingga, kemudian badan ini diberangus oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Desember 1964 melalui Keputusan Presiden No. 72/KOTI/1964 yang secara lengkap dicantumkan oleh *Merdeka* pada edisi 18 Desember 1964.

Setelahnya kampanye anti-BPS digencarkan dan memuncak pada bulan-bulan berikutnya, bahkan mencuat isu bahwa BPS disokong oleh CIA yang juga ingin membunuh Soekarno melalui ajaran Soekarnoisme tersebut. Isu ini dengan cepat mempengaruhi pandangan Soekarno. Pada Februari 1965, Presiden Soekarno menjelaskan alasannya melarang BPS adalah karena ia mendapat kabar rahasia bahwa BPS digunakan oleh CIA – Badan Intelejen Pusat AS untuk membunuhnya dengan Soekarnoisme (Smith, 1986).

Pasca BPS dibubarkan, *Merdeka* kemudian menjadi target teror utama dari PKI. Sejak hari dimana BPS dibubarkan *Merdeka* selalu mendapat teror baik terhadap penerbitannya maupun terhadap pemilik dan jajaran redaksinya. Tuduhan sebagai pers anti-revolusi dilayangkan pada *Merdeka* dibarengi dengan intimidasi dan pemaksaan untuk mengaku bersalah. Rangkaian tindakan keras ini memaksa

*Merdeka* untuk mengeluarkan pernyataan pembelaannya demi menunjukkan integritas diri kepada public dan pemerintah. Tulisan bertajuk “Sikap Merdeka, Ditujukan Pada Cakrawati” yang ditulis langsung oleh Pemimpin Redaksi *Merdeka* diturunkan dalam edisi 13 Februari 1965.

Begitu lihai PKI menghasut Presiden Soekarno agar membrangus juga surat kabar pendukung BPS agar BPS tidak mendapat kesempatan untuk hidup kembali. PKI membelokkan pikiran Soekarno menjadi tidak objektif (Chaniago, 1987). Kemudian, atas perintahnya kepada Menteri Penerangan Ahmadi, semua alat dan surat kabar antek BPS diberangus melalui Keputusan Menteri No. 17/SK/M/65 dan Keputusan Menteri No. 27/SK/M/65. Sebanyak 21 surat kabar dan majalah pendukung BPS diberangus, termasuk *Merdeka*. Presiden Soekarno memerintahkan pembrangusan tersebut atas desakkan massa dan PKI meskipun pada kenyataannya Presiden Soekarno sendiri tidak tahu-menahu secara mendalam mengenai siapa-siapa saja anggota dari BPS itu.

Sejak tanggal 25 Februari 1965 *Merdeka* absen dari hadapan pembacanya. Namun, sebelum resmi ‘mati’, *Merdeka* sempat memuat perintah itu dalam berita utamanya pada edisi 24 Februari 1965, ditulis dengan huruf kapital besar yang memenuhi kolom, berbunyi “Presiden Soekarno Perintahkan Bubarkan Alat-Alat dan Koran-Koran yang Menjadi Antek-Antek BPS”.

### **Redaksional Surat Kabar Merdeka Sepanjang Periode 1960-1965**

*Merdeka* adalah surat kabar yang terbit setiap hari, kecuali pada hari-hari perayaan besar, seperti Idul Fitri, tahun baru, atau hari ulang tahun proklamasi. Inilah mengapa *Merdeka* akrab disapa dengan sebutan ‘harian *Merdeka*’. Dalam setiap edisi regulernya *Merdeka* menerbitkan empat halaman yang di dalamnya mencakup berita-berita dari berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Liputannya berasal dari koresponden sendiri dan mengutip dari liputan *Antara*. *Merdeka* menerbitkan edisi khusus setiap kali perayaan ulang tahun proklamasi dan pada tanggal 1 Oktober yaitu hari ulang tahun *Merdeka*, edisi khusus itu terbit dengan lembaran ekstra sehingga memuat delapan halaman.

Setiap tahunnya *Merdeka* selalu menyajikan sesuatu yang baru dan berbeda untuk pembacanya. Selain menyajikan berita-berita terkini dan tulisan-tulisan dari

wartawannya, *Merdeka* juga menyajikan kolom-kolom hiburan untuk pembaca, berupa cerita novel pendek, cerita bergambar, komik komedi, serta karikatur. *Merdeka* juga menyajikan kolom Induk Karangan dan kolom pojok Notes Dr. Clenik. Induk Karangan merupakan sebuah kolom khusus berisi tulisan redaksional *Merdeka* yang berisi ulasan tentang kondisi terkini dan tanggapan serta kritikan *Merdeka* atas hal tersebut. Melalui kolom ini *Merdeka* juga selalu menyuarakan suara masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan pemerintah. Untuk iklan dan berbagai pengumuman diletakkan di setengah halaman ketiga dan pada halaman keempat.

Beberapa kali *Merdeka* menghadirkan edisi khusus Minggu *Merdeka* yang diterbitkan pada akhir pekan dan dijual eceran dengan harga Rp 1.50 per lembarnya. Isi dalam edisi khusus ini tentunya berbeda dengan edisi reguler, lebih mirip dengan isi majalah. Memuat berbagai ulasan dan informasi dari berbagai bidang, seperti seputar kesehatan, olahraga, keilmuan, pelayanan publik dan bidang-bidang lainnya. Terdapat pula berbagai cerpen dengan genre yang beragam, rubrik-rubrik hiburan seperti ulasan tentang suatu genre musik atau lagu, film, ataupun drama teater.

Tahun 1963 menjadi tahun yang amat penting, dimana saat itu *Merdeka* mengalami pergantian pemimpin redaksi. Selain itu, Indonesia mendapatkan kemenangannya atas Irian Barat dan sukses menggelar Ganefo I. Tahun ini juga menjadi garis awal *Merdeka* masuk dalam pusaran polemik antar pers. Tahun berikutnya, 1964, juga tidak kalah penting. Tahun 1964 menjadi tahun krusial, dimana polemik antar pers semakin mengeruh dan menempatkan *Merdeka* pada posisi yang tidak aman. Setelah tergabung dalam BPS *Merdeka* semakin menampakkan ketidaksukaannya terhadap PKI dan koran corongnya. Setelahnya, *Merdeka* berpamitan dengan para pembacanya pada edisi 24 Februari 1965. Tahun terakhir yang penuh makna dan berkesan bagi para pembaca.

## KESIMPULAN

Kenyataan terkait hegemoni negara dalam Demokrasi Terpimpin tercermin dalam dunia pers. Pada masa ini pers mengalami pengungkungan yang ketat

melalui regulasi dan pengawasan pemerintah yang represif. Pemerintah secara aktif mengontrol isi pemberitaan dan arah redaksi media massa. Pengendalian negara atas pers tidak hanya berlangsung melalui represi langsung, namun juga melalui penciptaan konsensus ideologi. Dimana melalui konsep Manipol-USDEK dan Nasakom negara membentuk suatu kesadaran kolektif masyarakat mengenai arah revolusi, nasionalisme, dan loyalitas terhadap Presiden Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi. Dalam penelitian ini didapati bahwa *Merdeka* meskipun adalah surat kabar yang tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun, tetap berperan dalam menyampaikan narasi yang selaras dengan ideologi negara, yang artinya *Merdeka* tidak sepenuhnya bebas dan beroperasi dalam koridor hegemonik yang telah dibentuk oleh negara.

Apa yang disampaikan di atas sejalan pula dengan teori pers otoriter yang mengasumsikan bahwa pers berfungsi sebagai corong pemerintah dan bukan sebagai pengawas pemerintah. Dalam sistem ini negara adalah aktor yang mendominasi dan memiliki otoritas untuk memberi izin, menyensor, bahkan membredel surat kabar yang dianggap sebagai pengancam. Penelitian ini menunjukkan sistem dan fungsi pers Indonesia pada masa itu menganut konsep otoriter, yakni pers digerakkan sebagai terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi Soekarno sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi serta mendoktrinasikan Manipol-USDEK. Dalam situasi ini *Merdeka* terus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan-kebijakan negara sebagai strategi untuk bertahan hidup.

Melalui sistem Pers Terpimpin, pers dijadikan sebagai alat revolusi, pengendali massa, dan corong pemerintah. Dengan berbagai kebijakannya sejak 1960, Demokrasi Terpimpin dipenuhi dengan ujian yang berat bagi surat kabar independen seperti *Merdeka*, karena diharuskan untuk berusaha agar selalu mempertahankan independensinya.

*Merdeka* merupakan surat kabar besar serta berpengaruh yang lahir beriringan dengan jalannya revolusi fisik di Indonesia. Memasuki era Terpimpin *Merdeka* tampil menjadi surat kabar independen yang mengikuti arus yang diciptakan oleh pemerintah, namun di sisi lain ia tetap kritis. *Merdeka* berusaha menyesuaikan diri dengan iklim politik yang represif tanpa sepenuhnya kehilangan karakter kritisnya.

Kritik tetap dilayangkan oleh *Merdeka* dengan bahasa dan nada yang konstruktif dan berpedoman pada Manipol. Dengan menerapkan strategi kompromi redaksional, *Merdeka* menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah, dan menyisipkan opini-opininya melalui rubrik Dr. Clenik. *Merdeka* juga senantiasa menyuarakan kebebasan pers dalam demokrasi. Sebab menurut *Merdeka* alat yang tepat untuk pers agar dapat menjalankan peran dan melaksanakan baktinya adalah kebebasan-kebebasan demokratis.

Seperti surat kabar lainnya, *Merdeka* juga harus dihadapkan pada dinamika internal dalam tubuh pengasuhnya. Paruh akhir tahun 1963 membawa *Merdeka* pada suatu perubahan yang berdampak signifikan bagi pertumbuhannya. Ketika posisi Joesoef sebagai pemimpin redaksi digantikan oleh Hiswara pasca munculnya kabar bahwa Joesoef membawa *Merdeka* keluar dari garis politiknya. Pencopotan Joesoef dari jabatan pemimpin redaksi menjadi polemik antar pers yang cukup besar. Setelahnya, di bawah kepemimpinan dan tanggung jawab Hiswara *Merdeka* tampil seagai salah satu kekuatan politik dalam menyelamatkan jalannya revolusi dengan kekuatan nasionalisme. *Merdeka* terus terlibat dalam pusaran polemik dengan PKI, dan tak pernah melunak. Sentimen terhadap PKI semakin diperlihatkan dalam tulisan Induk Karangan dan kolom Dr. Clenik.

Puncak dari pusaran polemik dengan PKI adalah ketika *Merdeka* bersama kawan-kawan pers anti-PKI lainnya bersepakat untuk membentuk suatu badan pendukung dan penyebar ajaran soekarnoisme yang murni, yaitu BPS. Perjuangannya bersama dengan BPS diwarnai dengan berbagai rintangan, kritikan, serta tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, atas bisikan PKI presiden memusuhi badan ini, hingga kemudian badan ini dibubarkan olehnya pada tanggal 17 Desember 1964 setelah hidup sekitar empat bulan lamanya. Setelahnya, muncul isu anti-BPS dan isu bahwa BPS ditunggangi CIA untuk membunuh Soekarno dengan ajaran Soekarnoisme. Sehingga presiden memutuskan untuk membrangus seluruh surat kabar anggota dan simpatisan BPS termasuk *Merdeka*, dan menghancurkan alat-alat BPS. Sejak tanggal 25 Februari 1965 *Merdeka* tidak lagi hadir menyapa pembacanya hingga tahun 1966 mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. (2010). *Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Yasif Watampone.
- Chaniago, J.R. (1987). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985*. Jakarta: Merdeka Sarana.
- Efendi, A. (2010). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: CV. Pamularsih.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Jakarta : LKiS.
- Dahana, A., & et.al. (2011). *Indonesia dalam Arus Sejarah (Jilid 7) : Pascarevolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Feith, Herbert. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Frederick, W. H., & Soeroto, S. (1982). *Pemahaman Sejarah Indonesia (Sebelum dan Sesudah Revolusi)*. Jakarta: LP3ES.
- H. Soebagijo IN. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Kakiailat, Toeti. (1997). *B.M. Diah: Wartawan Serba Bisa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasasmita, G., Prabowo, A., & Kesowo, B. (1997). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lee, Oey Hong. (1974). *Indonesian Government and Press During Guided Democracy*. Switzerland: Inter Documentation.
- Manan, Bagir. (2010). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKiS.
- Panitia Penyelenggara Peringatan HUT RI XXX. (1985). *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 2*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Panitia Penyelenggara Peringatan HUT RI XXX. (1985). *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 3*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

- Patria, N. (1999). *Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Poesponegoro, M. & Notosusanto, N. (2008). *SEJARAH NASIONAL INDONESIA JILID VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praptanto, E. (2016). *SEJARAH Indonesia 8: ZAMAN ORDE LAMA*. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA.
- Ricklefs, H.C. (1992). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- RN, H., & Harun, M. (2018). *JURNALISTIK PRAKTIS*. Syiah Kuala University Press.
- Roger, S. (2000). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Said, T. (1987). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Direktorat Publikasi Departemen penerangan RI.
- Salim, K., & Efriza. (2023). *Sosiologi Kekuasaan : Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). (1971). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Pertjetakan Negara.
- Shaffat, I. (2008). *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Simon, Roger. (2000). *Gagasan Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, Edward. (1983). *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Grafitipers).
- Subagijo, I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suwirta, A. (2000). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta) 1945-1947*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syafriadi. (2023). *Demokrasi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya.

- Tami, R., Zurmailis, Yulia, N., & Nadhirah, A. (2021). *HEGEMONI (Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press.
- Taufik, Iman. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Triyinco.
- Tim Penelitian Sejarah Pers di Indonesia. (1983). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI.
- Triyana, Bonnie., & Lane, Max. (2008). *Liber Amicorum: 80 Tahun Joesoef Isak – Seorang Wartawan, Penulis, dan Penerbit*. Jakarta : ISAI.
- Anggraeini, P. D., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2022). Revolusi Indonesia dalam Perspektif Pro dan Kontra Pers Nasional Periode Pasca Proklamasi Hingga Tercapainya Pengakuan Kedaulatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 35–58. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jps/article/view/25709>
- Harjito. (2009). Hegemoni Gramsci. *Majalah Ilmiah Lontar*, 23(4).
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 53–60. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>
- Munigar, M. M., Suwirta, A., & Fauzi, W. I. (2022). Pena Tajam Patriot Muda: Peran Intelektual Burhanudin Mohamad Diah pada Masa Revolusi Indonesia (1945-1949). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11(1), 67–78.
- Nurmansyah, David. (2017). Polemik Artikel Beladjar Memahami Sukarnoisme Karya Sayuti Melik Tahun 1964. *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 52-66.
- Rofa, N. N., Abdillah, A., & Isana, W. (2018). Kartun Politik dalam Harian Merdeka di Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1947). *Historia Madania*, 1(1), 1–26.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950 – 1965 : Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. *Sosiohumanika*, 1(2), 261–294.

- Triyono, D. A. (2013). The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 13(3), 194–201.
- Djamaluddin, D. (2006). *Harian Merdeka Sebuah Personal Journalism B.M.Diah (1945-1996)* (Tesis, Universitas Indonesia).
- Kusumadewi, I. A. (2011). *Peran Iklan Dalam Mengisi Kemerdekaan : Studi Kasus Surat Kabar Merdeka (1945-1949)* (Skripsi, Universitas Indonesia).
- Maharaja, A. B. (2022). *Peranan dan Kontribusi Surat Kabar Merdeka pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta).
- Prasetyo, U. (2016). *Perkembangan Surat Kabar Merdeka Tahun 1949-1950* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Pratama, O. S. (2018). *Sistem Pengawasan Pers Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Skripsi, Universitas Diponegoro).
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi 5 Juli 1959.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-Desember 1960.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-Desember 1961.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-Desember 1962.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-Desember 1963.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-Desember 1964.
- Surat Kabar *Merdeka* (harian) Edisi Januari-24 Februari 1965.